

# Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)

Oleh:

Berliana Aulia Putri

Ilmi Usrotin Choiriyah

Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April 2025



# Pendahuluan

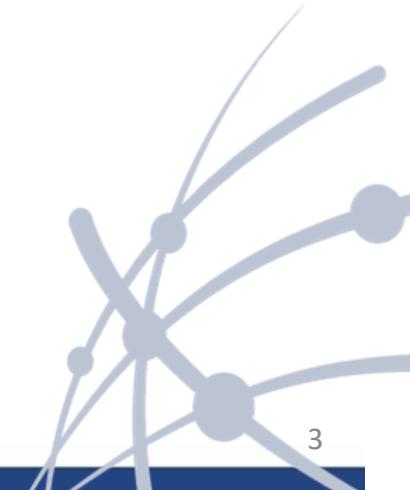
Desa memiliki peran vital dalam struktur pemerintahan Indonesia karena menjadi ujung tombak pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya alam dan karakteristik lokal yang unik, desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola secara tepat. Pemerintah mengesahkan **Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa** sebagai bentuk penguatan peran desa dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi dan sumber dayanya sendiri, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, desa diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Salah satu bentuk dukungan negara terhadap desa adalah melalui **Dana Desa** yang dialokasikan dari APBN. Dana ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pada tahun 2024, alokasi Dana Desa secara nasional mencapai **Rp71 triliun**, menunjukkan komitmen besar pemerintah terhadap pembangunan desa. Desa Ketapang, yang berada di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menjadi salah satu contoh desa yang aktif mengimplementasikan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan akibat bencana lumpur Lapindo, Desa Ketapang mampu mengalokasikan Dana Desa secara strategis, seperti dalam pelatihan keterampilan masyarakat, kegiatan pemberdayaan perempuan, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti **BUMDes**.

Melalui studi kasus ini, penelitian berupaya mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat dan membangun kemandirian desa secara berkelanjutan.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam analisis ini adalah bagaimana penerapan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo



# Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan metode **studi kasus eksploratif**, untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Dana Desa diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh perspektif langsung mengenai pelaksanaan program. Yang kedua yaitu dengan observasi langsung yang mana peneliti terlibat dalam pengamatan kegiatan-kegiatan desa seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes) dan pelatihan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dengan dokumentasi dengan mengkaji dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), laporan realisasi anggaran, dan peraturan terkait penggunaan Dana Desa.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan **analisis tematik** berdasarkan empat komponen teori implementasi kebijakan dari George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika pelaksanaan Dana Desa secara menyeluruh, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pemberdayaan masyarakat.



# Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis efektivitas melalui lima kriteria yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokras

## A. Komunikasi

Pemerintah Desa Ketapang telah melakukan komunikasi yang cukup baik dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)**. Informasi mengenai alokasi dan pelaksanaan program disampaikan secara terbuka kepada perwakilan masyarakat.

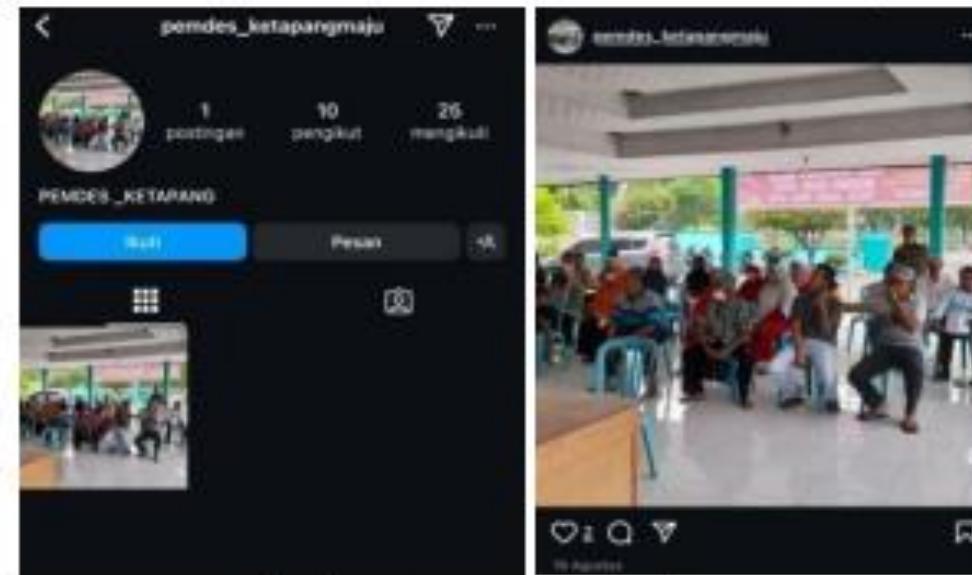


**Gambar 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Ketapang untuk Tahun 2024**

Sumber: Sekretaris Desa Ketapang, 2024

# Hasil dan Pembahasan

Namun demikian, **penyebaran informasi belum merata**, terutama kepada warga yang tidak hadir dalam pertemuan. Media sosial seperti akun Instagram resmi desa belum dimanfaatkan secara optimal, menyebabkan kesenjangan informasi. Komunikasi tatap muka tetap menjadi andalan, yang menyulitkan penyebaran informasi dalam kondisi darurat atau bagi kelompok masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi langsung.



**Gambar 2. Instagram Pemdes Ketapang**  
Sumber: Instagram @pemdes\_ketapangmaju

# Hasil dan Pembahasan

## B. Sumber Daya

Ketersediaan dana dari APBN yang dialokasikan melalui Dana Desa telah memungkinkan pemerintah desa menjalankan berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, penguatan BUMDes, dan pemberdayaan perempuan. Namun, **keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)** menjadi hambatan utama. Desa Ketapang memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil dan banyak warganya terdampak lumpur Lapindo, yang menyebabkan penurunan kualitas SDM. Akibatnya, pengelolaan program pemberdayaan belum optimal karena keterbatasan tenaga kerja yang kompeten.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanggulangin Tahun 2023

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)
Randegan	5.178
Kedensari	7.586
Kalisampurno	8.087
<b>Ketapang</b>	<b>1.758</b>
Gempolsari	4.423
Sentul	3.735
Penatarsewu	3.173
Banjarasri	2.708
Banjarpanji	1.714
Kedungbanteng	3.237
Kalidawir	4.354
Putat	3.571
Ngaban	4.843
Kalitengah	12.079
Kludan	5.033
Boro	4.898
Ketegan	5.160
Ganggang Panjang	5.626

Sumber: <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/publication/2024>

# Hasil dan Pembahasan

## C. Disposisi

Pelaksana kebijakan di Desa Ketapang, mulai dari kepala desa hingga perangkat desa lainnya, menunjukkan **komitmen yang kuat** terhadap keberhasilan implementasi Dana Desa. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif mereka dalam penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan program secara bertahap. Respon terhadap program pemberdayaan juga sangat positif. Pelaksana memberikan dukungan terhadap pelatihan-pelatihan yang diadakan, serta menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan program. Komitmen ini menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan, meskipun masih terkendala pada aspek lain seperti keterbatasan dokumen teknis.

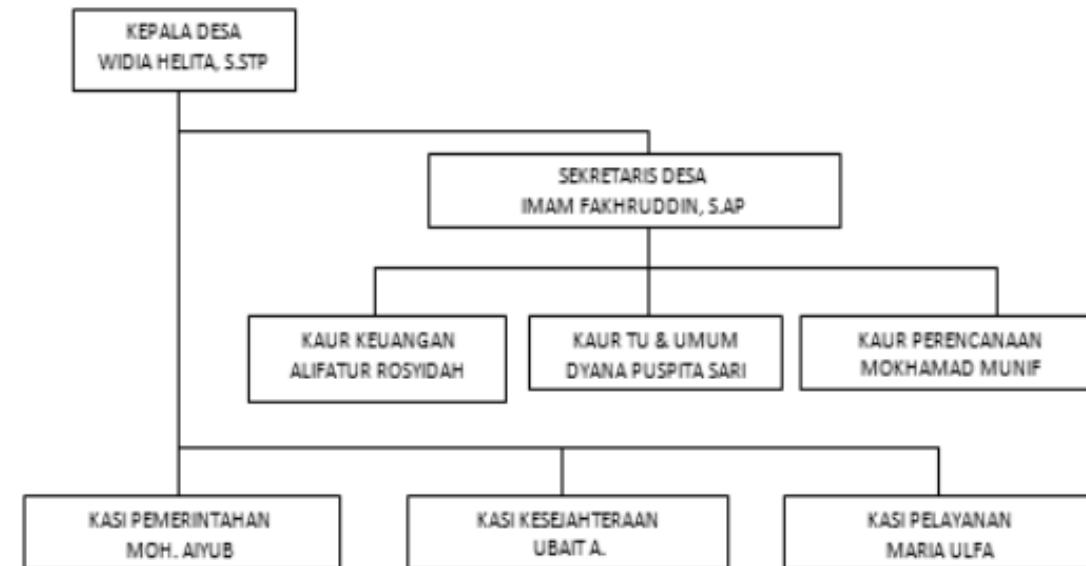


# Hasil dan Pembahasan

## D. Struktur Birokrasi

Secara struktural, Desa Ketapang memiliki **organisasi pemerintahan yang memadai**, dengan pembagian tugas yang cukup jelas. Tugas pelaksanaan pemberdayaan dikoordinasikan melalui kepala seksi kemasyarakatan dan perangkat terkait.

**Bagan 1. Struktur Birokrasi Pemerintah Desa Ketapang Tahun 2024**



Sumber : Sekretaris Desa Ketapang diolah oleh peneliti, 2024

Namun, kelemahan utama terletak pada **ketiadaan dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis**. Meskipun program dijalankan berdasarkan Permendesa No. 7 Tahun 2023, ketiadaan SOP lokal menyebabkan ketidakjelasan standar kerja dan potensi tumpang tindih kewenangan. Hal ini dapat mengganggu konsistensi pelaksanaan program dari tahun ke tahun.



# Temuan Penting Penelitian

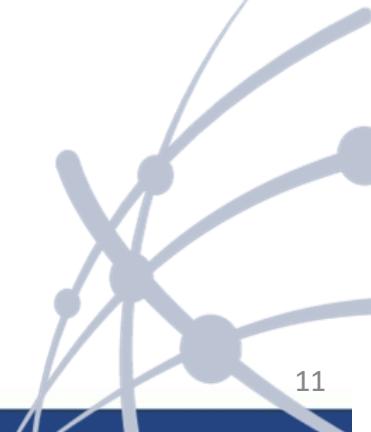
Temuan penting dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan program-program untuk implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketapang ini tidak lepas dari tantangan-tantangan yang ada. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan SDM. Dengan jumlah penduduk relatif kecil akibat dampak dari bencana Lumpur Lapindo, Desa Ketapang menghadapi kesulitan dalam mobilisasi SDM untuk mengelola dan menjalankan program-program pemberdayaan. Hal ini diperburuk oleh kondisi sosial-budaya masyarakat yang masih cenderung mempertahankan cara hidup yang masih tradisional, sehingga resistensi terhadap perubahan seringkali timbul saat ada program baru yang diperkenalkan. Selain itu, komunikasi menjadi aspek lain yang membutuhkan perhatian. Penyebaran informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat sebagian besar masih mengandalkan petemuan langsung, yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang mendapatkan informasi karena berhalangan hadi. Pemanfaatan media digital seperti akun media sosial desa juga belum optimal, dengan minimnya aktivitas yang memperbarui informasi terkait kegiatan desa.



# Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Penelitian ini memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan menggunakan teori implementasi George Edward III, penelitian ini memberikan contoh nyata bagaimana kebijakan dapat diukur dan dianalisis melalui empat indikator utama (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperluas pemahaman terhadap dinamika kebijakan di tingkat desa.

Bagi Pemerintah Desa Ketapang, hasil penelitian ini memberikan gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan dalam implementasi Dana Desa. Rekomendasi yang dihasilkan, seperti perlunya peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi media informasi, dan penyusunan SOP lokal, dapat menjadi masukan penting dalam perbaikan tata kelola desa di masa mendatang.



# Referensi

- [1] Cholisin, 'PENGEMBANGAN KARAKTER DALAM MATERI PEMBELAJARAN PKn', pp. 1–9, 2011.
- [2] M. Hasan and A. Muhammad, PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL. 2018. [Online]. Available: <http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku pembangunan ekonomi contoh fix.pdf>
- [3] A. Firdausi, 'Dana Desa di Sidoarjo Meningkat 600 Persen dalam 10 Tahun, Mampu Ciptakan Desa Mandiri', Sidoarjo, Nov. 2024.
- [4] J. Widodo, Analisis Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia, 2010.
- [5] K. Chasanah, S. Rosyadi, and D. Kurniasih, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa', Indones. J. Public Adm., vol. 3, no. 2, pp. 12–32, 2017, doi: 10.52447/ijpa.v3i2.921.
- [6] Z. R. Firdausa, A. Darmawan, and S. Hartono, 'IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMENUHANSARANA PRASARANA DI DESA BENDO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI', vol. 2, no.05, pp. 135–144, 2022.
- [7] L. Febriyani, 'IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESATERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM SKRIPSI', 2023, [Online]. Available: <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30859>
- [8] M. Ridwan and I. Ibty, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2016 DI DESA SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA', J. Enersia Publika Energi, Sos. dan Adm. Publik, vol. 3, no. 2, pp. 113–125, 2019.
- [9] A. M. Wumu, S. Dengo, and V. Y. Londa, 'Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara', J. Adm. Publik, vol. VIII, no. 113, pp. 39– 51, 2022.



# Referensi

- [10] D. Wisakti, 'Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kec. Geyer Kab. Grobogan', 2008, [Online]. Available: [http://eprints.undip.ac.id/16932%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/16932/1/DARU\\_WISAKTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16932%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/16932/1/DARU_WISAKTI.pdf)
- [11] D. Setyawan and N. B. Srihardjono, 'Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang', J. Reformasi, vol. 6, no. 2, pp. 125–133, 2016, [Online]. Available: <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- [12] N. D. S. Astutik, Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (Krpl) Dalam Meningkatkan Sumber Daya Pangan Masyarakat Di Kota Malang (Studi Di Kelurahan .... 2016. [Online]. Available: <http://repository.ub.ac.id/118267/>
- [13] Wawan Rahmadi, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Mamuju', Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc., vol. 7, no. 2, pp. 107–15, 2022, [Online]. Available: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13540/>
- [14] E. Hidayat, 'Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang', Soetomo Commun. Humanit., vol. 2, no. 1, pp. 126–136, 2021, doi: 10.25139/sch.v2i1.3165.
- [15] A. Harsin and E. I. Listiani, 'implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya', pp. 1–11, 2015.
- [16] A. P. SIPAYUNG, 'PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA DI CV. BINTANG TERANG', 2022.
- [17] I. N. Afifah and I. Rodiyah, 'Optimizing Rural Development: Strategic Implementation of the Village FundPolicy for Sustainable Community Empowerment', Indones. J. Public Policy Rev., vol. 24, pp. 1–12, 2024,doi: 10.21070/ijppr.v24i0.1343.



# Referensi

- [18] Agussalim, 'Implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone', no.1465140008, pp. 1–13, 2015.
- [19] M. Kapita, E. Mingkid, and J. J. Rares, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Bailengit KecamatanKao Barat Kabupaten Halmahera Utara', J. Pengelolaan Sumberd. Pembang., vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2021.
- [20] A. F. Fanani, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 DiKabupaten Ngawi', J. Gov. Innov., vol. 4, no. 1, pp. 46–64, 2022, doi: 10.36636/jogiv.v4i1.1242.
- [21] A. Amanda, 'IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA KARANG JAYA KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSIBENGKULU', pp. 1–10, [Online]. Available: [http://eprints.ipdn.ac.id/13021/1/Ringkasann\\_Skripsi\(rev\).pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/13021/1/Ringkasann_Skripsi(rev).pdf)



